

WIDYA MANDALA SPEAKS ON ACCOUNTING 1

Disusun oleh:

HENDRA KURNIAWAN	1021510016	2015
ADKHILNA HURIN AININ	1021510001	2015
ACHMAD SOFYAN TSAURI	1021510043	2015

PROGAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA GRESIK

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Karya Tulis :
 Nama Perguruan Tinggi : Universitas Internasional Semen Indonesia

3. Ketua Kelompok

a. Nama Lengkap :

b. NIM:

c. Alamat Email

4. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap b. NIDN

Gresik, 20 Maret 2017

Dosen Pembimbing Ketua Tim

(Dr. Erlina Diamastuti, S.E., Msi., Ak., CA.) (Achmad Sofyan Tsauri)

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS NASKAH PAPER/ KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 1. ACHMAD SOFYAN TSAURI

2. ADKHILNA HURIN AININ

3. HENDRA KURNIAWAN

Alamat :

karya menyatakan tulis Dengan bahwa paper/ dengan judul " Adalah benar-benar asli asli merupakan hasil paper/karya tulis kami (bukan jiplakan) dan karya tulis tersebut belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain dan/atau dipublikasikan, kecuali dalam kegiatan "Widya Mandala Speaks On Accounting 1" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Manda Surabaya. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia mendapat sanksi dan didiskualifikasi dari kompetisi tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa unsur paksaan dari siapapun.

Gresik, 20 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan

Penulis

Materai

6000

BAB I

A. Latar Belakang

Tax amnesty sebagai tantangan tututan bahkan delima bagi pemerintah maupun WP di satu sisi keadilan dan demokrasi dipertanyakan, di satu sisi masyarakat merasakan terancam dengan adanya tax amnesty disisi yang lain pemerintah merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kemandirian bangsa dari segi finansial. Dari segi dimensi waktu dan ruang lingkup terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dan pengawasan penerimanaan pajak, mungkinkah tax amnesty ini adalah jalan terakhir ketidak berdayaan pemerintah dalam menjamin resiko dan keamanan atas aset bangasanya. Haruskah lembaga terpercaya diluar negeri menjadi tempat diamankannya aset-aset milik warga Indonesia. Sehingga begitu miskin Indonesia dimata dunia yang tidak melindungi dan megelola kekayaan bangsanya sendiri.

Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan landasan berpikir secara bebas dan berpendapat secara terbuka dalam bertindak dan bersikap, tiba-tiba diberlakukan suatu kebijakan yakni tax amnesty yang justru menyudutkan masyarakat yang ingin menjamin keamanan atas kekayaan yang dimilikinnya. Sedangkan resiko finansial di negara indonesia saat ini bisa dibilang tinggi dalam kemampuan menjamin kekayaan masyarakat. Ditengah laju pertumbuhan inflasi dan keterbatasan kemampuan mengelola kekayaan alamnya, sudah cukup membukitkan bahwa negara ini belum cukup mampu mendukung kekayaan warga negaranya agar aman dan terjamin di negerinya sendiri.

- Masyarakat kecil pun tidak luput dari desakan tax amnesty yang menuntut transparasi dan akuntabilitas di tengah keterbatasan pengusaha dan rakyat kecil yang terbatas secara akademis Pemerintah memberi peluang bagi pelanggar pajak untuk bebas dari sanksi pajak.
- Tax amnesty merugikan negara karena memberikan pelanggar pajak untuk bebas dari sanksi pajak
- Tax amnesty tidak menjamin para pelanggar pajak bebas dari tuntutan pajak.
- Resiko keamanan menyebabkan orang kaya enggan melakukan tax amnesty.

-